



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengatur tentang Standar Harga Satuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 84);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPK, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPK Non ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK, Anggota TNI/Polri dan Atlit.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
29. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk kepentingan dinas.
30. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
31. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Representasi adalah komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas.
33. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan tugas kedinasannya.
35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
36. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
38. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
39. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
40. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-Purchasing.
41. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
42. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
43. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan kurikulum berbasis kompetensi.

44. Tenaga Ahli Fraksi DPRK adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi di DPRK.
45. Pengawal Voorijder adalah pengawalan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
46. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBK.
47. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
48. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
49. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
50. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

## Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
  - f. satuan biaya sewa;
- (3) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
- (4) Dalam perencanaan anggaran, Harga Satuan dimaksudkan untuk digunakan sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPK;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBK.
- (5) Dalam pelaksanaan Anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar; dan
- c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah

### Pasal 3

- (1) Satuan biaya honorarium dan uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan Anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.

## BAB II

### SATUAN BIAYA HONORARIUM

#### Bagian Kesatu Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang

### Pasal 5

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD, PA, Kuasa BUD, dan KPA; dan
  - b. PPTK;
  - c. PPK SKPK/PPK Unit SKPK;
  - d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan
  - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dihitung berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran.

11

- (3) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada Pengurus Barang Pengelola, pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus barang pengguna, pembantu Pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu.

**Bagian Kedua**  
**Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 6**

- (1) Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) SKPK diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Apabila dalam SKPK tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa, maka pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari SKPK lain.

**Pasal 7**

- (1) Honorarium PPK diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
- (2) Honorarium diberikan kepada PPK dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA/KPA tidak menunjuk/memberikan kewenangan kepada PPK, maka PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK dan tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 8**

- (1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan PA/KPA.

**Bagian Ketiga**  
**Honorarium Narasumber/Pembahas. Moderator. Pembawa Acara.**  
**Pembaca Al Quran/Do'a. Pemimpin Lagu dan Panitia**

**Pasal 9**

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota DPRK, ASN, dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- (2) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Narasumber atau pembahas berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.
- (4) Narasumber atau pembahas dapat berasal dari SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (5) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### Pasal 10

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.
- (2) Honorarium dapat diberikan kepada pembaca Al Quran, pembaca do'a dan pemimpin lagu dalam acara pembukaan/penutupan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

#### Pasal 12

- (1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

- (3) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.
- (4) Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang harian sebagai pengganti biaya transportasi (non pegawai) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana Kegiatan dan  
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 13

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan SKPK lain.
- (2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah kabupaten dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
  - c. bersifat koordinatif antar satuan kerja perangkat kabupaten untuk tim yang ditandatangani oleh Sekda;
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Pasal 14

- (1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, jumlah keanggotaan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebanyak 7 orang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim yang keanggotaanya mengikutsertakan Instansi dari satuan kerja diluar Pemerintah Kabupaten Bireuen, jumlah keanggotaan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah honorarium yang dapat diterima oleh masing-masing pejabat adalah sebagai berikut:
  - a. pejabat eselon II adalah 2 (dua) honorarium Tim
  - b. pejabat eselon III adalah 3 (tiga) honorarium Tim
  - c. pejabat eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional 5 (lima) honorarium Tim
- (4) Tim yang diatur dengan Peraturan tersendiri, jumlah personalia dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan dimaksud dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPK.

## Pasal 15

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang masuk dalam struktur tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, sebagai berikut:
- a. Tim yang dibentuk adalah dalam rangka penanggulangan atau penanganan keadaan darurat atau kejadian luar biasa;
  - b. Tim yang pelaksanaan kegiatannya minimal melibatkan 3 (tiga) unsur instansi vertikal;
  - c. Tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah yang dalam rangkaian proses penyusunannya wajib melalui tahapan harmonisasi, fasilitasi dan evaluasi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan;atau
  - d. Tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

## Pasal 16

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota panitia/tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan dalam perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

## Pasal 17

- (1) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.
- (2) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
  - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.

## Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Petugas Pendukung yang bersifat internal SKPK, ditetapkan oleh kepala SKPK atas nama Bupati.

## Pasal 19

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah, jumlah anggota kesektariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

## Pasal 20

Honorarium admin dapat diberikan kepada ASN atau Non ASN yang mengelola Aplikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Honorarium Pemberi Keterangan Ahli.**  
**Saksi Ahli dan Beracara**

**Pasal 21**

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

**Pasal 22**

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

**Bagian Keenam**  
**Honorarium Tenaga Honorer Daerah,**  
**Petugas Fungsional Tertentu, dan Rohaniwan**

**Pasal 23**

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Non ASN selaku tenaga honorer daerah dan kepada petugas fungsional tertentu sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website**

**Pasal 24**

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- (2) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin atau majalah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati, Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Honorarium Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal,  
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (2) Honorarium penyelenggara Ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokasi.
- (3) Honorarium penyelenggara Ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian Akhir.
- (4) Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten.

Pasal 26

- (1) Honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada penceramah, pengajar, penyusun modul diklat, dan panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
  - b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
  - c. dalam hal penceramah berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.
- (4) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (5) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka, ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada PNS atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati.
- (7) Satuan biaya penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- (8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

#### Bagian Kesembilan Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang milik daerah Pada Pengelola Barang;
- Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- Pengurus Barang Pengguna, Yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada Pengguna Barang;
- Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

#### Makan Minum Rapat/Tamu dan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

##### Pasal 27

- Makan rapat diberikan apabila melaksanakan rapat lebih dari 3 (tiga) jam berturut-turut dalam 1 (satu) kegiatan.
- SKPK dapat menganggarkan penyediaan makanan dan minuman Penambah Daya Tahan Tubuh bagi pegawai.

- (3) Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.
- (4) Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah.
- (5) Satuan Biaya Honorarium, Uang Rapat, dan Konsumsi Rapat, besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Negeri

##### Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- (2) Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat Daerah, ASN, Non ASN dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
  - c. pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

- (4) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen:
- uang harian;
  - biaya transport;
  - biaya penginapan; dan
  - uang representasi perjalanan dinas.

### Pasal 29

- Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, adalah merupakan satuan biaya yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, Non ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan, yang masing-masing keperluan perinciannya sebagai berikut:
  - untuk uang saku sebesar 60% (enam puluh persen);
  - transportasi lokal sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - uang makan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam, dapat diberikan uang harian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang disebutkan jam penugasannya dalam surat tugas.
- Perjalanan dinas dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam, hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.
- Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 Lampiran II.
- Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi dan pulang.
- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 Lampiran II.
- Pembayaran biaya tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Tabel 2.3 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
- Satuan biaya taksi digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:
  - Keberangkatan:
    - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

- b. Kepulangan:
- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (11) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas terinci pada Tabel 2.4 Lampiran II.
- (12) Pembayaran satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
- (13) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam provinsi Aceh atau sebaliknya.
- (14) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way*) terinci pada Tabel 2.5 Lampiran II.
- (15) Perjalanan dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.
- (16) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.
- (17) Sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan diberikan untuk biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
- (18) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) terinci sebagaimana tercantum pada tabel 3.0 Lampiran.
- (19) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- (20) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (21) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) tidak berlaku pada kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.
- (22) Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (19), terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 Lampiran II Peraturan ini.

- (23) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (24) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- (25) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Satuan biaya uang representasi, terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 Lampiran II Peraturan ini.
- (26) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan biaya riil.
- (27) Biaya perjalanan dinas untuk aparat pengawasan pada Inspektorat ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport dengan ketentuan melampirkan bukti *print out* pembelian BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang berlokasi antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan tanggal yang tertera pada *print out* bukti pembelian BBM dari SPBU tersebut harus sesuai dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas
- (2) Dalam hal antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas tidak terdapat SPBU, maka pembelian BBM dapat dilakukan di SPBU terdekat dari jalur pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Kendaraan dinas dapat ditambah biaya tol dengan bukti pertanggungjawaban *print out/struk gerbang tol* yang dilalui dari tempat kedudukan ke tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya tol dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil)

#### Bagian Kedua Pembayaran Perjalanan Dinas

#### Pasal 31

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Dalam hal biaya perjalanan dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudahnya.

## Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabel

## Pasal 33

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, ASN, Non ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. daftar pengeluaran riil;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara *at cost* (biaya riil) wajib melampirkan:
  - a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
  - e. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, bermaterai Rp10.000,- yang dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas; dan
  - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

- (6) Segala dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

#### Pasal 34

- (1) Standar biaya perjalanan dinas, masing-masing komponen besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

### BAB IV

#### SATUAN BIAYA DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR KANTOR

#### Pasal 35

- (1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor terbagi menjadi :
- a. Paket *Fullboard*
  - b. Paket *Fullday*
  - c. Paket *Halfday*
  - d. Paket *Residence*
- (3) Paket *Fullboard* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *Fullday* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *Halfday* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *Residence* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

### Pasal 36

- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor paket *Fullboard* untuk pejabat eselon dua atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. Untuk pejabat eselon tiga kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor tercantum sebagaimana dalam lampiran

## BAB V

### SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### Pasal 37

- (1) Satuan biaya pemeliharaan meliputi:
  - a. pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
  - b. pemeliharaan kendaraan dinas; dan
  - c. pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
  - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
  - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- (4) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.
- (5) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, tidak diperuntukkan bagi:
  - a. kendaraan rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

- (7) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal.
- (8) Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Standar biaya pemeliharaan, besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 851

41

**LAMPIRAN I:**  
**PERATURAN BUPATI BIREUEN**  
**NOMOR 20 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN**  
**2026**

**SATUAN BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSI RAPAT,**  
**MAKAN LEMBUR DAN UANG LAUK PAUK**

| NO. | URAIAN   |  | SATUAN | JUMLAH    |
|-----|--|--|--------|-----------|
| (1) | (2)  |  | (3)    | (4)       |
| 1.  | SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH: |  |        |           |
|     | 1.1  | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengguna Anggaran (PA) |        |           |
|     | a.   | Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta   | OB     | 1.040.000 |
|     | b.   | Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta  | OB     | 1.250.000 |
|     | c.   | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta   | OB     | 1.450.000 |
|     | d.   | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar   | OB     | 1.660.000 |
|     | e.   | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar   | OB     | 1.970.000 |
|     | f.   | Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar   | OB     | 2.280.000 |
|     | g.   | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar  | OB     | 2.590.000 |
|     | h.   | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar   | OB     | 3.010.000 |
|     | i.   | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar   | OB     | 3.420.000 |
|     | j.   | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar   | OB     | 3.840.000 |
|     | k.   | Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar  | OB     | 4.250.000 |
|     | l.   | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar   | OB     | 4.770.000 |
|     | m.   | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar   | OB     | 5.290.000 |
|     | n.   | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar   | OB     | 5.810.000 |
|     | o.   | Nilai pagu dana diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 triliun  | OB     | 6.330.000 |
|     | p.   | Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun  | OB     | 7.370.000 |
|     |  |  |        |           |
|     | 1.2  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  |        |           |
|     | a.   | Nilai s.d Rp. 100 juta   | OB     | 1.010.000 |
|     | b.   | Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta  | OB     | 1.210.000 |
|     | c.   | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta   | OB     | 1.410.000 |
|     | d.   | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar   | OB     | 1.610.000 |
|     | e.   | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar   | OB     | 1.910.000 |
|     | f.   | Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar   | OB     | 2.210.000 |
|     | g.   | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar  | OB     | 2.520.000 |
|     | h.   | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar   | OB     | 2.920.000 |

01

| NO. | URAIAN  |   |  | SATUAN | JUMLAH    |
|-----|---|---|--|--------|-----------|
| (1) | (2)   |   |  | (3)    | (4)       |
|     | i.  | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar    |  | OB     | 3.320.000 |
|     | j.  | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar    |  | OB     | 3.720.000 |
|     | k.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar  |  | OB     | 4.130.000 |
|     | l.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar |  | OB     | 4.630.000 |
|     | m.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar |  | OB     | 5.130.000 |
|     | n.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar |  | OB     | 5.640.000 |
|     | o.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun  |  | OB     | 6.140.000 |
|     | p.  | Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun             |  | OB     | 7.140.000 |
|     | <u>PENJELASAN:</u>  |   |  |        |           |
|     | 1. Honorarium PPTK diberikan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, misalnya kegiatan yang dapat diselesaikan 3 (tiga) bulan, honor PPTK dibayarkan hanya untuk 3 (tiga) bulan;<br>2. PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran kegiatan/sub kegiatan. |   |  |        |           |
| 1.3 | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)/ PPK Unit SKPK  |   |  |        |           |
|     | a.  | Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta                          |  | OB     | 400.000   |
|     | b.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta     |  | OB     | 480.000   |
|     | c.  | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta      |  | OB     | 570.000   |
|     | d.  | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar      |  | OB     | 660.000   |
|     | e.  | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar    |  | OB     | 770.000   |
|     | f.  | Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar    |  | OB     | 880.000   |
|     | g.  | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar     |  | OB     | 990.000   |
|     | h.  | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar    |  | OB     | 1.250.000 |
|     | i.  | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar    |  | OB     | 1.520.000 |
|     | j.  | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar    |  | OB     | 1.780.000 |
|     | k.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar  |  | OB     | 2.040.000 |
|     | l.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar |  | OB     | 2.440.000 |
|     | m.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar |  | OB     | 2.830.000 |
|     | n.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar |  | OB     | 3.230.000 |
|     | o.  | Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun  |  | OB     | 3.620.000 |
|     | q.  | Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun             |  | OB     | 4.420.000 |
| 1.4 | Staf Administrasi PPK-SKPK / Unit SKPK  |   |  |        |           |
|     | a.  | Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1 miliar                         |  | OB     | 400.000   |

| NO. | URAIAN  |  | SATUAN | JUMLAH    |
|-----|---|--|--------|-----------|
| (1) | (2)   |  | (3)    | (4)       |
|     | b.  | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB     | 500.000   |
|     | c.  | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar                  | OB     | 600.000   |
| 1.5 | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan                   |  |        |           |
|     | a.  | Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta                     | OB     | 340.000   |
|     | b.  | Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta        | OB     | 420.000   |
|     | c.  | Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta        | OB     | 500.000   |
|     | d.  | Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar         | OB     | 570.000   |
|     | e.  | Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar   | OB     | 670.000   |
|     | f.  | Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar   | OB     | 770.000   |
|     | g.  | Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar    | OB     | 860.000   |
|     | h.  | Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar   | OB     | 1.090.000 |
|     | i.  | Nilai Pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar    | OB     | 1.320.000 |
|     | j.  | Nilai Pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar    | OB     | 1.550.000 |
|     | k.  | Nilai Pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar   | OB     | 1.780.000 |
|     | l.  | Nilai Pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar  | OB     | 2.120.000 |
|     | m.  | Nilai Pagu di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar  | OB     | 2.470.000 |
|     | n.  | Nilai Pagu di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar  | OB     | 2.810.000 |
|     | o.  | Nilai Pagu di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun   | OB     | 3.160.000 |
|     | p.  | Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun                      | OB     | 3.840.000 |
| 1.6 | Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu |  |        |           |
|     | a.  | Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta                     | OB     | 260.000   |
|     | b.  | Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta        | OB     | 310.000   |
|     | c.  | Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta        | OB     | 370.000   |
|     | d.  | Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar         | OB     | 430.000   |
|     | e.  | Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar      | OB     | 500.000   |
|     | f.  | Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar      | OB     | 570.000   |
|     | g.  | Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar       | OB     | 640.000   |
|     | h.  | Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar   | OB     | 810.000   |
|     | i.  | Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar   | OB     | 980.000   |
|     | j.  | Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar   | OB     | 1.150.000 |
|     | k.  | Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar  | OB     | 1.330.000 |
|     | l.  | Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB     | 1.580.000 |
|     | m.  | Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB     | 1.840.000 |

67

| NO. | URAIAN  |  |  | SATUAN | JUMLAH    |
|-----|---|--|--|--------|-----------|
| (1) | (2)   |  |  | (3)    | (4)       |
|     | n.  | Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar   |  | OB     | 2.090.000 |
|     | o.  | Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun  |  | OB     | 2.350.000 |
|     | p.  | Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun   |  | OB     | 2.860.000 |
|     |   |  |  |        |           |
| 1.7 | Petugas Pembantu Administrasi BUD:  |  |  |        |           |
|     | 1.7.1   | Golongan III   |  | OB     | 1.000.000 |
|     | 1.7.2   | Golongan II  |  | OB     | 750.000   |
|     |   |  |  |        |           |
| 2.  | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA:   |  |  |        |           |
| 2.1 | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                                      |  |  | OB     | 680.000   |
| 3.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi: |  |  |        |           |
|     | a.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta  |  | OP     | 850.000   |
|     | b.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar  |  | OP     | 1.020.000 |
|     | c.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar   |  | OP     | 1.270.000 |
|     | d.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar   |  | OP     | 1.520.000 |
|     | e.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar  |  | OP     | 1.780.000 |
|     | f.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. 25 miliar   |  | OP     | 2.120.000 |
|     | g.  | Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   |  | OP     | 2.450.000 |
|     | h.  | Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp50 miliar  |  | OP     | 2.790.000 |
|     | <u>PENJELASAN:</u>  |  |  |        |           |
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.</li> <li>➤ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang</li> </ul> |  |        |           |
| 3.3 | Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang               |  |  |        |           |
|     | a.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta  |  | OP     | 760.000   |
|     | b.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar  |  | OP     | 920.000   |
|     | c.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar   |  | OP     | 1.140.000 |
|     | d.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar   |  | OP     | 1.370.000 |
|     | e.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar  |  | OP     | 1.600.000 |
|     | f.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. 25 miliar   |  | OP     | 1.910.000 |
|     | g.  | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar  |  | OP     | 2.210.000 |
|     | h   | Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar   |  | OP     | 2.520.000 |
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.</li> <li>➤ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang</li> </ul> |  |        |           |
|     |   |  |  |        |           |

| NO. | URAIAN  |  |    | SATUAN    | JUMLAH |
|-----|---|--|----|-----------|--------|
| (1) | (2)   |  |    | (3)       | (4)    |
| 3.4 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi                                   |  |    |           |        |
|     | a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta                 |  | OP | 480.000   |        |
|     | b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta                 |  | OP | 600.000   |        |
|     | c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar                 |  | OP | 720.000   |        |
|     | d. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar               |  | OP | 910.000   |        |
|     | e. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar               |  | OP | 1.090.000 |        |
|     | f. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar                |  | OP | 1.270.000 |        |
|     | g. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 10 miliar                                 |  | OP | 1.510.000 |        |
|     | ➤ untuk nilai pagu s.d. Rp.10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.                          |  |    |           |        |
|     | ➤ untuk nilai pagu di atas Rp. 10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang                       |  |    |           |        |
| 3.5 | Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ):  |  |    |           |        |
|     | a. Kepala   |  | OB | 1.000.000 |        |
|     | b. Sekretaris/Staf Pendukung  |  | OB | 750.000   |        |
| 3   | HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PEMBACA AL-QURAN /DOA/ PEMIMPIN LAGU/ PANITIA:    |  |    |           |        |
| 3.1 | Honorarium Narasumber/Pembahas:   |  |    |           |        |
|     | a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya   |  | OJ | 1.700.000 |        |
|     | b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan                   |  | OJ | 1.400.000 |        |
|     | c. Pejabat Eselon I/ Pejabat dari Pemerintah Pusat  |  | OJ | 1.200.000 |        |
|     | d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan   |  | OJ | 1.000.000 |        |
|     | e. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan  |  | OJ | 900.000   |        |
| 3.2 | Honorarium Moderator (seminar, lokakarya, diklat, BIMTEK)   |  | OK | 700.000   |        |
| 3.3 | Honorarium Pembawa Acara/MC   |  | OK | 400.000   |        |
| 3.4 | Pembaca Al-Quran/Shalawat   |  | OK | 400.000   |        |
| 3.5 | Pembaca Do'a  |  | OK | 400.000   |        |
| 3.6 | Pemimpin Lagu/Dirigen Musik   |  | OK | 200.000   |        |
| 3.7 | Honorarium Panitia:   |  |    |           |        |
|     | a. Penanggung Jawab   |  | OK | 450.000   |        |
|     | b. Ketua/Wakil Ketua  |  | OK | 400.000   |        |
|     | c. Sekretaris   |  | OK | 300.000   |        |
|     | d. Anggota  |  | OK | 300.000   |        |
| 3.8 | Biaya Uang Saku Peserta Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis                            |  | OK | 100.000   |        |
| 3.9 | Biaya Uang Saku Peserta Pertemuan Pers dengan Pimpinan  |  | OK | 200.000   |        |
| 4.0 | Pakar/Ahli/Profesional Sebagai Narasumber Yang Mempunyai Skill Khusus Dalam Bidang Tertentu Yang Diundang : |  |    |           |        |
|     | a. Dari dalam Provinsi Aceh   |  | OJ | 1.400.000 |        |
|     | b. Dari Luar Provinsi Aceh  |  | OJ | 1.700.000 |        |

| NO. | URAIAN   |   | SATUAN      | JUMLAH    |
|-----|--|---|-------------|-----------|
| (1) | (2)  |   | (3)         | (4)       |
| 4.  | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN                                 |   |             |           |
| 4.1 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |   |             |           |
|     | 4.1.1  | Yang ditetapkan oleh Bupati   |             |           |
|     | a.   | Pengarah  | OB          | 1.500.000 |
|     | b.   | Penanggung Jawab  | OB          | 1.250.000 |
|     | c.   | Ketua   | OB          | 1.000.000 |
|     | d.   | Wakil Ketua   | OB          | 850.000   |
|     | e.   | Sekretaris  | OB          | 750.000   |
|     | f.   | Anggota   | OB          | 750.000   |
|     | 4.1.2  | Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah  |             |           |
|     | a.   | Pengarah  | OB          | 750.000   |
|     | b.   | Penanggung Jawab  | OB          | 700.000   |
|     | c.   | Ketua   | OB          | 650.000   |
|     | d.   | Wakil Ketua   | OB          | 600.000   |
|     | e.   | Sekretaris  | OB          | 500.000   |
|     | f.   | Anggota   | OB          | 500.000   |
| 4.2 | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  |   |             |           |
|     | 4.2.1  | Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah  |             |           |
|     | a.   | Ketua/Wakil Ketua   |             | 250.000   |
|     | b.   | Anggota   |             | 220.000   |
| 5.  | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA   |   |             |           |
|     | a.   | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli                                 | OK          | 1.800.000 |
|     | b.   | Honorarium Beracara   | OK          | 1.800.000 |
|     | c.   | Honorarium Saksi  | Per Perkara | 200.000   |
| 6.  | HONORARIUM PEGAWAI/TENAGA HONORER/KONTRAK UNTUK TENAGA ADMINISTRASI/OPERATOR KOMPUTER ATAU NAMA LAINNYA. |   |             |           |
|     | a.   | Tenaga Non ASN  | OB          | 550.000   |
|     | b.   | Adc. Bupati   | OB          | 2.000.000 |
|     | c.   | Adc. Wakil Bupati   | OB          | 1.750.000 |
|     | d.   | Adc. Sekretaris Daerah  | OB          | 1.500.000 |
|     | e.   | Adc. Pimpinan DPRK  | OB          | 1.500.000 |
|     | f.   | Tenaga Ahli Bupati  | OB          | 3.000.000 |
|     | g.   | Sekretaris Bupati (Non ASN)   | OB          | 1.500.000 |
|     | h.   | Sekretaris Wakil Bupati/ Sekda (Non ASN)                                      | OB          | 1.000.000 |
|     | i.   | Sekretaris Ketua PKK/BKMT/DWP   | OB          | 1.000.000 |
|     | j.   | Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (Non ASN)                          | OB          | 2.000.000 |
|     | K  | Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (ASN)                              | OB          | 1.500.000 |
|     | l.   | Supir Pimpinan DPRK (Non ASN)   | OB          | 1.000.000 |
|     | m.   | Supir Kepala SKPK/Asisten (Non ASN)   | OB          | 1.000.000 |
|     | n.   | Supir Ketua PKK/ Ketua DWP/BKMT (Non ASN)                                     | OB          | 1.000.000 |
|     | o.   | Sekretaris Pimpinan DPRK (Non ASN)  | OB          | 1.000.000 |
|     | p.   | Sopir Kendaraan Operasional   | OB          | 550.000   |
|     | q.   | Pengamanan Tertutup Bupati  | OB          | 2.500.000 |
|     | r.   | Operator Komputer   | OB          | 400.000   |
|     | s.   | Petugas Ruang Kerja Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Pendopo (Non ASN) | OB          | 1.000.000 |
|     | t.   | Koordinator Pramu Tamu Rumah Bupati/Wakil Bupati (Non ASN)                    | OB          | 1.500.000 |
|     | u.   | Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati (Non ASN)                               | OB          | 1.250.000 |

71

| NO.  | URAIAN  |                         | SATUAN      | JUMLAH    |
|------|---|-------------------------|-------------|-----------|
| (1)  | (2)   |                         | (3)         | (4)       |
| v.   | Juru Masak Rumah Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah (Non ASN)                                |                         | OB          | 1.000.000 |
| w.   | Honorarium admin SIPD/E-BMD Kabupaten   |                         | OB          | 2.000.000 |
| 7.   | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  |                         |             |           |
| a.   | SLTA  |                         | OB          | 1.470.000 |
| b.   | DI/DII/DIII/Sarjana Terapan   |                         | OB          | 1.680.000 |
| c.   | Sarjana (S1)  |                         | OB          | 1.820.000 |
| d.   | Master (S2)   |                         | OB          | 1.960.000 |
| e.   | Doktor (S3)   |                         | OB          | 2.100.000 |
| 8.   | HONORARIUM ROHANIWAN  |                         | OK          | 400.000   |
| 9.   | HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE |                         |             |           |
| 9.1  | Honorarium Tim Penyusun Jurnal  |                         |             |           |
| a.   | Penanggung Jawab  |                         | Oter        | 500.000   |
| b.   | Redaktur  |                         | Oter        | 400.000   |
| c.   | Penyunting/Editor   |                         | Oter        | 300.000   |
| d.   | Desain Grafis   |                         | Oter        | 180.000   |
| e.   | Fotografer  |                         | Oter        | 180.000   |
| f.   | Sekretariat   |                         | Oter        | 150.000   |
| g.   | Pembuat Artikel   |                         | Oter        | 200.000   |
| 9.2  | Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah   |                         |             |           |
| a.   | Penanggung Jawab  |                         | Oter        | 400.000   |
| b.   | Redaktur  |                         | Oter        | 300.000   |
| c.   | Penyunting/Editor   |                         | Oter        | 250.000   |
| d.   | Desain Grafis   |                         | Oter        | 180.000   |
| e.   | Fotografer  |                         | Oter        | 180.000   |
| f.   | Sekretariat   |                         | Oter        | 150.000   |
| g.   | Pembuat Artikel Jurnal  |                         | Per halaman | 200.000   |
| h.   | Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Wabsite   |                         | Per halaman | 100.000   |
| 9.3  | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website  |                         |             |           |
| a.   | Penanggung Jawab  |                         | OB          | 500.000   |
| b.   | Redaktur  |                         | OB          | 450.000   |
| c.   | Editor  |                         | OB          | 400.000   |
| d.   | Web Admin   |                         | OB          | 350.000   |
| e.   | Web Developer   |                         | OB          | 300.000   |
| f.   | Pembuat Artikel   |                         | Per Halaman | 100.000   |
| 10   | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN  |                         |             |           |
| 11.1 | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar   |                         |             |           |
| a.   | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian   | Naskah/<br>Pelajaran    | 150.000     |           |
| b.   | Pengawas Ujian  | OH                      | 240.000     |           |
| c.   | Pemeriksa Hasil Ujian   | Siswa/<br>Mata<br>Ujian | 5.000       |           |
| 11.2 | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah  |                         |             |           |
| a.   | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian   | Naskah/<br>Pelajaran    | 190.000     |           |
| b.   | Pengawas Ujian  | OH                      | 270.000     |           |
| c.   | Pemeriksa Hasil Ujian   | Siswa/<br>Mata<br>Ujian | 7.500       |           |

| NO. | URAIAN   |   | SATUAN         | JUMLAH    |
|-----|--|---|----------------|-----------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)            |           |
| 12  | <b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL</b>                                       |   |                |           |
|     | 12.1   | Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Kabupaten              | Per Butir Soal | 100.000   |
|     | 12.2   | Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten:               |                |           |
|     | a.   | Telaah Materi Soal  | Per Butir Soal | 45.000    |
|     | b.   | Telaah Bahasa Soal  | Per Butir Soal | 20.000    |
| 13  | <b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b> |   |                |           |
|     | 13.1   | Honorarium Penceramah   | OJP            | 750.000   |
|     | 13.2   | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK Penyelenggara | OJP            | 300.000   |
|     | 13.3   | Honorarium Pengajar dari dalam SKPK Penyelenggara             | OJP            | 200.000   |
|     | 13.4   | Honorarium Penyusun Modul Diklat                              | Per Modul      | 3.500.000 |
|     | 13.5   | Honorarium Pengawas Ujian Diklat                              | OH             | 450.000   |
|     | 13.6   | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat              |                |           |
|     | 13.6.1   | Lama Diklat s.d. 5 (lima) hari:                               |                |           |
|     | a.   | Penanggung Jawab  | OK             | 450.000   |
|     | b.   | Ketua/Wakil Ketua   | OK             | 400.000   |
|     | c.   | Sekretaris  | OK             | 300.000   |
|     | d.   | Anggota   | OK             | 300.000   |
|     | 13.6.2   | Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:                                   |                |           |
|     | a.   | Penanggung Jawab  | OK             | 675.000   |
|     | b.   | Ketua/Wakil Ketua   | OK             | 600.000   |
|     | c.   | Sekretaris  | OK             | 450.000   |
|     | d.   | Anggota   | OK             | 450.000   |
|     | 13.6.3   | Lama Diklat lebih dari 30 hari:                               |                |           |
|     | a.   | Penanggung Jawab  | OK             | 900.000   |
|     | b.   | Ketua/Wakil Ketua   | OK             | 800.000   |
|     | c.   | Sekretaris  | OK             | 600.000   |
|     | d.   | Anggota   | OK             | 600.000   |
| 14  | <b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)</b>                   |   |                |           |
|     | 14.1   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten                  |                |           |
|     | a.   | Pembina   | OB             | 3.500.000 |
|     | b.   | Pengarah  | OB             | 3.000.000 |
|     | c.   | Ketua   | OB             | 2.500.000 |
|     | d.   | Wakil Ketua   | OB             | 2.000.000 |
|     | e.   | Sekretaris  | OB             | 1.500.000 |
|     | f.   | Anggota   | OB             | 1.300.000 |
|     | 14.2   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten      |                |           |
|     | a.   | Ketua   | OB             | 1.000.000 |
|     | b.   | Sekretaris  | OB             | 900.000   |
|     | c.   | Anggota   | OB             | 600.000   |

11

| NO.  | URAIAN   |       | SATUAN     | JUMLAH |
|------|--|-------|------------|--------|
| (1)  | (2)  |       | (3)        | (4)    |
| 15   | HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH                          |       |            |        |
| a.   | Pengurus Barang Pengelola  | OB    | 500.000    |        |
| b.   | Pembantu Pengurus Barang Pengelola                               | OB    | 450.000    |        |
| c.   | Pengurus Barang Pengguna   | OB    | 400.000    |        |
| d.   | Pembantu Pengurus Barang Pengguna                                | OB    | 350.000    |        |
| e.   | Pengurus Barang Pembantu   | OB    | 300.000    |        |
| 16   | HONORARIUM LAINNYA   |       |            |        |
| 16.1 | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen               |       |            |        |
| a.   | Ketua  |       | 6,000,000  |        |
| b.   | Anggota  |       | 5,000,000  |        |
|      | Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen   |       |            |        |
| a.   | Ketua  | OB    | 3,000,000  |        |
| b.   | Anggota  | OB    | 2,000,000  |        |
| 16.2 | Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama                    |       |            |        |
| a.   | Ketua  | Kali  | 1,000,000  |        |
| b.   | Wakil Ketua  | Kali  | 900,000    |        |
| c.   | Sekretaris   | Kali  | 800,000    |        |
| d.   | Anggota  | Kali  | 700,000    |        |
| 16.3 | Honorarium dalam Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen |       |            |        |
| a.   | Ketua Pemangku Adat  | OB    | 1.000.000  |        |
| b.   | Wakil Ketua  | OB    | 700.000    |        |
| c.   | Sekretaris   | OB    | 500.000    |        |
| d.   | Anggota  | OB    | 400.000    |        |
| 16.4 | Honorarium Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kebupaten Bireuen    |       |            |        |
| a.   | Ketua Dewan Pengurus MAA Kabupaten Bireuen                       | OB    | 2.000.000  |        |
| b.   | Wakil Ketua  | OB    | 1.200.000  |        |
| c.   | Ketua Bidang   | OB    | 800.000    |        |
| d.   | Anggota  | OB    | 600.000    |        |
|      | Dewan Pengurus MAA Kecamatan                                     | OB    | 300.000    |        |
| 16.5 | Tim Seleksi Penerimaan Calon ASN                                 |       |            |        |
| a.   | Admin SSASN (PPPK)   | OB    | 500.000    |        |
| b.   | Verifikator SSASN (PPPK)   | OB    | 500.000    |        |
| c.   | Operator HelpDesk (PPPK)   | OB    | 500.000    |        |
| d.   | Operator Call Center (PPPK)                                      | OB    | 500.000    |        |
| e.   | Penanggung Jawab Lokasi (PPPK)                                   | OH    | 300.000    |        |
| f.   | Pengawas Ujian CAT (PPPK)  | OH    | 300.000    |        |
| g.   | Operator/Teknisi CAT   | OH    | 300.000    |        |
| h.   | Dana Ujian CAT/Dana Kontribusi Penerimaan CASN formasi Umum      | Paket | 50.000.000 |        |

| NO.  | URAIAN   |  | SATUAN    | JUMLAH    |
|------|--|--|-----------|-----------|
| (1)  | (2)  |  | (3)       | (4)       |
|      | 16.6   | Honorarium Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung |           |           |
|      | a.   | Ketua  | OB        | 1.500.000 |
|      | b.   | Sekretaris   | OB        | 1.000.000 |
|      | c.   | Anggota  | OB        | 750.000   |
|      | Honorarium Tim Penilik Bangunan Gedung                                 |  |           |           |
|      | a.   | Ketua  | OB        | 1.000.000 |
|      | b.   | Anggota  | OB        | 1.000.000 |
|      | Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung                          |  |           |           |
|      | a.   | Ketua  | OB        | 1.000.000 |
|      | b.   | Anggota  | OB        | 750.000   |
|      | Honorarium Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung                            |  |           |           |
|      | a.   | Ketua  | OB        | 1.200.000 |
|      | b.   | Anggota  | OB        | 1.000.000 |
|      |  |  |           |           |
| 16.7 | Honorarium Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh                             |  |           |           |
|      | a.   | Penanggung Jawab Badan Reintegrasi Aceh (BRA)          | OB        | 2.300.000 |
|      | b.   | Koordinator Badan Reintegrasi Aceh (BRA)               | OB        | 1.100.000 |
|      | c.   | Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA)                     | OB        | 2.200.000 |
|      | d.   | Wakil Ketua  | OB        | 1.500.000 |
|      | e.   | Sekretaris   | OB        | 1.700.000 |
|      | f.   | Ketua Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)              | OB        | 1.000.000 |
|      | g.   | Anggota Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)            | OB        | 500.000   |
|      |  |  |           |           |
| 17   | SATUAN BIAYA UPAH PEKERJAAN PADA DINAS PUPR                            |  |           |           |
|      | a.   | Kepala Tukang  | OH        | 175,000   |
|      | b.   | Kepala Tukang Batu                                     | OH        | 175,000   |
|      | c.   | Kepala Tukang Kayu/ Cat                                | OH        | 175,000   |
|      | d.   | Mandor   | OH        | 181,300   |
|      | e.   | Mekanik  | OH        | 156,300   |
|      | f.   | Operator   | OH        | 312,500   |
|      | g.   | Operator Semi Terlatih                                 | OH        | 187,500   |
|      | h.   | Pekerja  | OH        | 150,000   |
|      | i.   | Pekerja Galian Tanah                                   | OH        | 150,000   |
|      | j.   | Pekerja Semi Terlatih                                  | OH        | 150,000   |
|      | k.   | Pekerja Tak Terlatih                                   | OH        | 137,500   |
|      | l.   | Pekerja Terlatih                                       | OH        | 150,000   |
|      | m.   | Pembantu Mekanik                                       | OH        | 137,500   |
|      | n.   | Pembantu Operator                                      | OH        | 187,500   |
|      | o.   | Pembantu Sopir / Driver                                | OH        | 137,500   |
|      | p.   | Penjaga Malam  | OH        | 137,500   |
|      | q.   | Sopir / Driver   | OH        | 150,000   |
|      | r.   | Tukang   | OH        | 168,800   |
|      | s.   | Tukang Batu/ Besi                                      | OH        | 168,800   |
|      | t.   | Tukang Kayu/ Cat                                       | OH        | 168,800   |
|      |  |  |           |           |
| 18   | SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN/ALAT BERAT UNTUK PEKERJAAN PADA DINAS PUPR |  |           |           |
|      | 1.   | Asphalt Distributor                                    | Liter     | 618,800   |
|      | 2.   | Asphalt Finisher                                       | Ton       | 552,400   |
|      | 3.   | Baby Vibratory Roller 1-2 T.                           | Ton       | 121,700   |
|      | 4.   | Blending Equipment                                     | Ton       | 318,200   |
|      | 5.   | Bore Pile Machine                                      | CM        | 1,019,000 |
|      | 6.   | Bulldozer 100-150 Hp                                   | -         | 1,133,700 |
|      | 7.   | Compressor 4000-6500 L\m                               | CPM/(L/m) | 283,800   |

| NO.  | URAIAN   |  | SATUAN        | JUMLAH    |
|------|--|--|---------------|-----------|
| (1)  | (2)  |  | (3)           | (4)       |
|      | 8. Concrete Batching Plant   |  | M3/jam        | 801,300   |
|      | 9. Concrete Mixer 0.3-0.6 M3   |  | Liter         | 148,900   |
|      | 10. Concrete Pump  |  | M3/jam        | 729,000   |
|      | 11. Concrete Vibrator  |  | -             | 91,300    |
|      | 12. Crane 10-15 Ton  |  | Ton           | 957,200   |
|      | 13. Crane On Track 75-100 Ton  |  | Ton           | 3,045,400 |
|      | 14. Dump Truck 10 Ton (6-8 M3)   |  | M3            | 1,124,800 |
|      | 15. Dump Truck 4 Ton (2-3 M3)  |  | M3            | 592,700   |
|      | 16. Excavator 80-140 Hp  |  | M3            | 753,800   |
|      | 17. Flat Bed Truck 3-4 Ton   |  | Ton           | 556,700   |
|      | 18. Generator Set  |  | KVA           | 662,700   |
|      | 19. Jack Hammer  |  | -             | 81,500    |
|      | 20. Kunci Torsi 200-1000N.M  |  | buaht<br>baut | 80,800    |
|      | 21. Mesin Penyaring 8 Hp   |  | -             | 110,700   |
|      | 22. Mini Excavator 40-60 Hp  |  | M3            | 288,700   |
|      | 23. Motor Grader >100 Hp   |  | -             | 752,700   |
|      | 24. Power Broom  |  | M2/Jam        | 115,800   |
|      | 25. Stamper  |  | m2/jam        | 120,000   |
|      | 26. Stone Crusher  |  | T/Jam         | 1,239,900 |
|      | 27. Tandem Roller 6-8 T.   |  | Ton           | 634,500   |
|      | 28. Tandem Roller 8-10 T.  |  | Ton           | 692,000   |
|      | 29. Thermoplastic Road Marking Machine   |  | m/jam         | 118,800   |
|      | 30. Three Wheel Roller 6-8 T   |  | Ton           | 384,400   |
|      | 31. Tire Roller 8-10 T.  |  | Ton           | 942,300   |
|      | 32. Trailer 30 Ton   |  | Ton           | 1,029,000 |
|      | 33. Truk Mixer (Agitator)  |  | M3            | 1,136,500 |
|      | 34. Vibratory Roller 5-8 T.  |  | Ton           | 484,800   |
|      | 35. Water Pump 70-100 Mm   |  | -             | 93,500    |
|      | 36. Water Tanker 3000-4500 L.  |  | Liter         | 664,000   |
|      | 37. Welding Machine, 300 A   |  | -             | 97,000    |
|      | 38. Welding Set  |  | Amp           | 105,400   |
|      | 39. Wheel Loader 1.0-1.6 M3  |  | M3            | 729,900   |
|      |  |  |               |           |
|      |  |  |               |           |
| 19   | Makan Minum Rapat/Tamu, Uang Lauk Pauk dan Biaya makanan penambah Daya tahan Tubuh |  |               |           |
| 16.1 | MAKAN MINUM RAPAT/TAMU   |  |               |           |
|      | a. Nasi Kotak (daging rendang)   |  | Kotak         | 37.500    |
|      | b. Nasi Kotak (ikan bakar)   |  | Kotak         | 37.500    |
|      | c. Nasi Kotak (ayam)   |  | Kotak         | 35.000    |
|      | d. Nasi Bungkus (lauk standar/ikan)  |  | Bungkus       | 25.000    |
|      | e. Snack Kotak   |  | Kotak         | 10.000    |
|      | f. Snack VIP   |  | Porsi         | 30.000    |
|      | g. Snack Buah-Buahan   |  | Porsi         | 50.000    |
|      | h. Prasmanan Biasa   |  | OK            | 75.000    |
|      | i. Prasmanan VIP   |  | OK            | 100.000   |
|      | j. Kopi Espresso   |  | Cup           | 8.000     |
|      | k. Sanger espresso (panas)   |  | Gelas         | 13.000    |
|      | l. Sanger espresso (dingin)  |  | Gelas         | 17.000    |
|      | m. Aneka Jus   |  | Gelas         | 15.000    |
|      |  |  |               |           |
|      |  |  |               |           |

| NO.  | URAIAN                                    |   | SATUAN | JUMLAH  |
|------|---|---|--------|---------|
| (1)  | (2)                                       |   | (3)    | (4)     |
| 16.2 | SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT (RAPAT BIASA) |   |        |         |
|      | Makan                                     |   | OK     | 51.000  |
|      | Kudapan (Snack)                           |   | OK     | 20.000  |
| 16.3 | SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS      |   |        |         |
|      | a.  | Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas<br>Kebersihan/ Pramubakti | Setel  | 820.000 |
|      | b.  | Pakaian Dinas Pegawai                                     | Setel  | 900.000 |

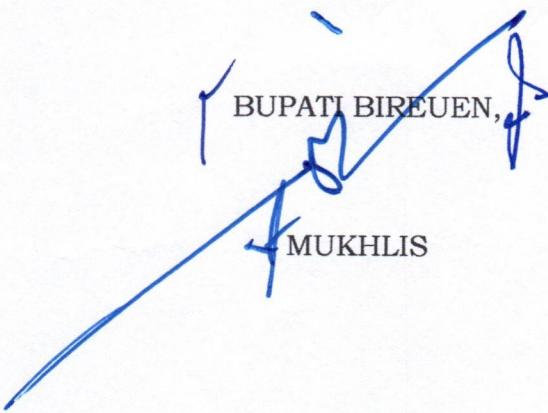
Keterangan:

- OJ : Orang/Jam  
 OH : Orang/Hari  
 OB : Orang/Bulan  
 OT : Orang/Tahun  
 OP : Orang/Paket  
 OK : Orang/Kegiatan  
 OR : Orang/Responden  
 Oter : Orang/Terbitan  
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

Catatan:

Makan minum VIP khusus untuk :

- (1) Tamu Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
- (2) Tamu/Rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRK



A handwritten signature in blue ink, reading "BUPATI BIREUEN," above "MUKHLIS". The signature is fluid and cursive, with some loops and variations in line thickness.

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN  
2026

TABEL 2.1

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

| NO. | URAIAN                   | SATUAN | BESARAN   |
|-----|--------------------------|--------|-----------|
| (1) | (2)                      | (3)    | (4)       |
| 1.  | Honorarium Narasumber    | OJ     | 1.700.000 |
| 2.  | Honorarium Moderator     | OK     | 1.000.000 |
| 3.  | Honorarium Pembawa Acara | OK     | 750.000   |



TABEL – 2.2  
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | LUAR DAERAH | DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT  |
|-----|---------------------|--------|-------------|---|---------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)         | (5)                                     | (6)     |
| 1.  | ACEH                | OH     | 360.000     | 140.000                                 | 110.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 3.  | RIAU                | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 5.  | JAMBI               | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | 410.000     |   | 120.000 |
| 11. | BANTEN              | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | 430.000     |   | 130.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | 530.000     |   | 160.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | 420.000     |   | 130.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | 410.000     |   | 120.000 |
| 17. | BALI                | OH     | 480.000     |   | 140.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 440.000     |   | 130.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 430.000     |   | 130.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 360.000     |   | 110.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 430.000     |   | 130.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 430.000     |   | 130.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 26. | GORONTALO           | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | 410.000     |   | 120.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | 430.000     |   | 130.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | 370.000     |   | 110.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 31. | MALUKU              | OH     | 380.000     |   | 110.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | 430.000     |   | 130.000 |
| 33. | PAPUA               | OH     | 580.000     |   | 170.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | 480.000     |   | 140.000 |

BUPATI BIREUEN,

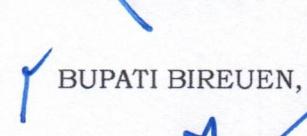
MUKHLIS

TABEL – 2.3  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS  
PULANG PERGI (PP)

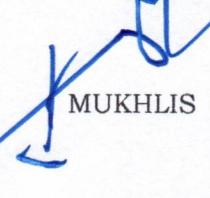
| NO | KOTA       |                | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) |            |
|----|------------|----------------|-------------------------|------------|
|    | ASAL       | TUJUAN         | BISNIS                  | EKONOMI    |
| 1  | 2          | 3              | 4                       | 5          |
| 1  | BANDA ACEH | MEDAN          | 3.466.000               | 2.193.000  |
| 2  | BANDA ACEH | JAKARTA        | 7.519.000               | 4.492.000  |
| 3  | BANDA ACEH | BALIKPAPAN     | 12.739.000              | 6.749.000  |
| 4  | BANDA ACEH | BANDAR LAMPUNG | 8.225.000               | 4.760.000  |
| 5  | BANDA ACEH | DENPASAR       | 10.835.000              | 6.279.000  |
| 6  | BANDA ACEH | JAYAPURA       | 19.167.000              | 10.717.000 |
| 7  | BANDA ACEH | YOGYAKARTA     | 9.765.000               | 5.380.000  |
| 8  | BANDA ACEH | MAKASSAR       | 12.760.000              | 6.781.000  |
| 9  | BANDA ACEH | MANADO         | 15.798.000              | 7.926.000  |
| 10 | BANDA ACEH | PONTIANAK      | 9.990.000               | 5.840.000  |
| 11 | BANDA ACEH | SEMARANG       | 9.530.000               | 5.305.000  |
| 12 | BANDA ACEH | SOLO           | 9.530.000               | 5.444.000  |
| 13 | BANDA ACEH | SURABAYA       | 10.985.000              | 5.744.000  |
| 14 | BANDA ACEH | TIMIKA         | 18.504.000              | 10.076.000 |
| 15 | BANDA ACEH | BANJARMASIN    | 10.792.000              | 6.022.000  |
| 16 | BANDA ACEH | BATAM          | 10.439.000              | 5.936.000  |
| 17 | BANDA ACEH | BIAK           | 18.718.000              | 10.108.000 |
| 18 | BANDA ACEH | KENDARI        | 12.953.000              | 7.102.000  |
| 19 | BANDA ACEH | MALANG         | 10.204.000              | 5.765.000  |
| 20 | BANDA ACEH | MATARAM        | 10.846.000              | 6.246.000  |
| 21 | BANDA ACEH | PALANGKARAYA   | 10.546.000              | 6.022.000  |
| 22 | MEDAN      | JAKARTA        | 7.252.000               | 3.808.000  |
| 23 | MEDAN      | MAKASSAR       | 12.514.000              | 6.172.000  |
| 24 | MEDAN      | PONTIANAK      | 9.733.000               | 5.230.000  |
| 25 | MEDAN      | SEMARANG       | 9.284.000               | 4.696.000  |
| 26 | MEDAN      | SOLO           | 9.284.000               | 4.835.000  |
| 27 | MEDAN      | SURABAYA       | 10.739.000              | 5.134.000  |
| 28 | MEDAN      | TIMIKA         | 18.258.000              | 9.455.000  |
| 29 | MEDAN      | BANJARMASIN    | 10.546.000              | 5.412.000  |
| 30 | MEDAN      | PALANGKARAYA   | 10.300.000              | 5.412.000  |
| 31 | MEDAN      | YOGYAKARTA     | 9.519.000               | 4.770.000  |
| 32 | MEDAN      | BALIKPAPAN     | 12.493.000              | 6.140.000  |
| 33 | MEDAN      | BANDAR LAMPUNG | 7.979.000               | 4.150.000  |
| 34 | MEDAN      | MATARAM        | 10.600.000              | 5.637.000  |
| 35 | JAKARTA    | PADANG         | 5.530.000               | 2.952.000  |
| 36 | JAKARTA    | PALANGKARAYA   | 4.984.000               | 2.984.000  |
| 37 | JAKARTA    | PALEMBANG      | 3.861.000               | 2.268.000  |
| 38 | JAKARTA    | PALU           | 9.348.000               | 5.113.000  |
| 39 | JAKARTA    | PANGKAL PINANG | 3.412.000               | 2.139.000  |
| 40 | JAKARTA    | PEKANBARU      | 5.583.000               | 3.016.000  |
| 41 | JAKARTA    | PONTIANAK      | 4.353.000               | 2.781.000  |

17

| NO. | KOTA    |          | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) |           |
|-----|---------|----------|-------------------------|-----------|
|     | ASAL    | TUJUAN   | BISNIS                  | EKONOMI   |
| 42  | JAKARTA | SEMARANG | 3.861.000               | 2.182.000 |
| 43  | JAKARTA | SOLO     | 3.861.000               | 2.342.000 |
| 44  | JAKARTA | SURABAYA | 5.466.000               | 2.674.000 |
| 45  | JAKARTA | TERNATE  | 10.001.000              | 6.664.000 |
| 46  | JAKARTA | TIMIKA   | 13.830.000              | 7.487.000 |
| 47  | JAKARTA | BANDUNG  | 2.064.000               | 1.476.000 |



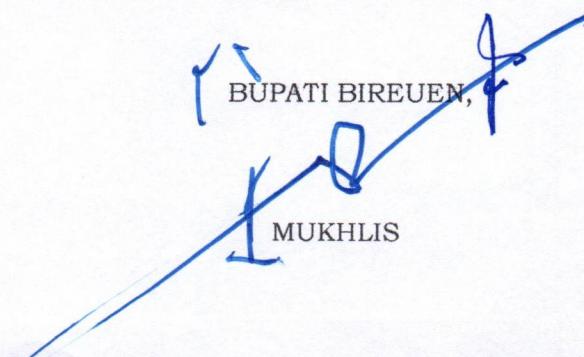
BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS

TABEL – 2.4  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

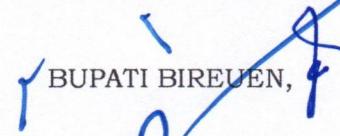
| NO | PROVINSI            | SATUAN      | BESARAN (Rp) |
|----|---------------------|-------------|--------------|
| 1  | 2                   | 3           | 4            |
| 1  | ACEH                | Orang/ Kali | 127.000      |
| 2  | SUMATERA UTARA      | Orang/ Kali | 308.000      |
| 3  | RIAU                | Orang/ Kali | 101.000      |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/ Kali | 165.000      |
| 5  | JAMBI               | Orang/ Kali | 147.000      |
| 6  | SUMATERA BARAT      | Orang/ Kali | 190.000      |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | Orang/ Kali | 179.000      |
| 8  | LAMPUNG             | Orang/ Kali | 168.000      |
| 9  | BENGKULU            | Orang/ Kali | 109.000      |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | Orang/ Kali | 90.000       |
| 11 | BANTEN              | Orang/ Kali | 536.000      |
| 12 | JAWA BARAT          | Orang/ Kali | 200.000      |
| 13 | D.K.I. JAKARTA      | Orang/ Kali | 256.000      |
| 14 | JAWA TENGAH         | Orang/ Kali | 108.000      |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA     | Orang/ Kali | 267.000      |
| 16 | JAWA TIMUR          | Orang/ Kali | 233.000      |
| 17 | BALI                | Orang/ Kali | 227.000      |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/ Kali | 231.000      |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/ Kali | 116.000      |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | Orang/ Kali | 171.000      |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/ Kali | 134.000      |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/ Kali | 180.000      |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/ Kali | 533.000      |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | Orang/ Kali | 218.000      |
| 25 | SULAWESI UTARA      | Orang/ Kali | 138.000      |
| 26 | GORONTALO           | Orang/ Kali | 265.000      |
| 27 | SULAWESI BARAT      | Orang/ Kali | 313.000      |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | Orang/ Kali | 187.000      |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | Orang/ Kali | 165.000      |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | Orang/ Kali | 171.000      |
| 31 | MALUKU              | Orang/ Kali | 288.000      |
| 32 | MALUKU UTARA        | Orang/ Kali | 215.000      |
| 33 | PAPUA               | Orang/ Kali | 513.000      |
| 34 | PAPUA BARAT         | Orang/ Kali | 236.000      |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA    | Orang/ Kali | 236.000      |
| 36 | PAPUA TENGAH        | Orang/ Kali | 513.000      |
| 37 | PAPUA SELATAN       | Orang/ Kali | 513.000      |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN    | Orang/ Kali | 513.000      |


  
 BUPATI BIREUEN,  
 MUKHLIS

21

TABEL – 2.5  
 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BIREUEN KE KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PROVINSI ACEH (ONE WAY)

| NO | KABUPATEN ASAL | KABUPATEN/KOTA TUJUAN | SATUAN      | BESARAN |
|----|----------------|-----------------------|-------------|---------|
| 1  | 2              | 3                     | 4           | 5       |
| 1  | Bireuen        | Kota Lhokseumawe      | Orang/ Kali | 30.000  |
| 2  | Bireuen        | Kab. Aceh Utara       | Orang/ Kali | 45.000  |
| 3  | Bireuen        | Kab. Aceh Timur       | Orang/ Kali | 80.000  |
| 4  | Bireuen        | Kota Langsa           | Orang/ Kali | 100.000 |
| 5  | Bireuen        | Kab. Aceh Tamiang     | Orang/ Kali | 150.000 |
| 6  | Bireuen        | Kab. Pidie Jaya       | Orang/ Kali | 40.000  |
| 7  | Bireuen        | Kab. Pidie            | Orang/ Kali | 60.000  |
| 8  | Bireuen        | Kab. Aceh Besar       | Orang/ Kali | 80.000  |
| 9  | Bireuen        | Kota Banda Aceh       | Orang/ Kali | 220.000 |
| 10 | Bireuen        | Kab. Bener Meriah     | Orang/ Kali | 75.000  |
| 11 | Bireuen        | Kab. Aceh Tengah      | Orang/ Kali | 85.000  |
| 12 | Bireuen        | Kab. Gayo Lues        | Orang/ Kali | 200.000 |
| 13 | Bireuen        | Kab. Aceh Jaya        | Orang/ Kali | 200.000 |
| 14 | Bireuen        | Kab. Aceh Barat       | Orang/ Kali | 240.000 |
| 15 | Bireuen        | Kab. Nagan Raya       | Orang/ Kali | 260.000 |
| 16 | Bireuen        | Kab. Aceh Barat Daya  | Orang/ Kali | 280.000 |
| 17 | Bireuen        | Kab. Aceh Selatan     | Orang/ Kali | 300.000 |
| 18 | Bireuen        | Kab. Tenggara         | Orang/ Kali | 350.000 |
| 19 | Bireuen        | Kota Subulussalam     | Orang/ Kali | 370.000 |
| 20 | Bireuen        | Kab. Aceh Singkil     | Orang/ Kali | 400.000 |

  
 BUPATI BIREUEN,  
  
 MUKHLIS

**TABEL -2.6**  
**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| NO      | PROVINSI           | SATUAN | BUPATI/WAKIL<br>BUPATI/<br>KETUA/WAKIL<br>KETUA DPRK | ANGGOTA DPRK/<br>PEJABAT ES. II | PEJABAT<br>ES. III/<br>PEGAWAI<br>GOL. IV | PEJABAT ES.<br>IV/ PEGAWAI<br>GOL. III/II/I |
|---------|--------------------|--------|--|---------------------------------|---|---|
|         |                    |        | (A)  |                                 |   |   |
| 1       | 2                  | 3      | 4  | 5                               | 6   | 7   |
| 1       | ACEH               | OH     | 4.420.000  | 3.526.000                       | 1.533.000                                 | 770.000                                     |
| 2       | SUMATERA UTARA     | OH     | 4.960.000  | 2.195.000                       | 1.100.000                                 | 699.000                                     |
| 3       | RIAU               | OH     | 3.820.000  | 3.119.000                       | 1.650.000                                 | 852.000                                     |
| 4       | KEP. RIAU          | OH     | 5.344.000  | 2.318.000                       | 1.297.000                                 | 792.000                                     |
| 5       | JAMBI              | OH     | 5.000.000  | 4.102.000                       | 1.225.000                                 | 580.000                                     |
| 6       | SUMATERA BARAT     | OH     | 5.236.000  | 3.332.000                       | 1.353.000                                 | 701.000                                     |
| 7       | SUMATERA SELATAN   | OH     | 5.850.000  | 3.083.000                       | 1.571.000                                 | 861.000                                     |
| 8       | LAMPUNG            | OH     | 4.491.000  | 2.488.000                       | 1.425.000                                 | 580.000                                     |
| 9       | BENGKULU           | OH     | 2.140.000  | 1.628.000                       | 1.546.000                                 | 692.000                                     |
| 10      | BANGKA BELITUNG    | OH     | 3.827.000  | 2.838.000                       | 1.957.000                                 | 622.000                                     |
| 11      | BANTEN             | OH     | 5.725.000  | 2.373.000                       | 1.000.000                                 | 718.000                                     |
| I<br>2. | JAWA BARAT         | OH     | 5.381.000  | 2.755.000                       | 1.201.000                                 | 686.000                                     |
| 13      | D.K.I. JAKARTA     | OH     | 8.720.000  | 2.063.000                       | 992.000                                   | 730.000                                     |
| 14      | JAWA TENGAH        | OH     | 5.303.000  | 1.850.000                       | 1.201.000                                 | 750.000                                     |
| 15      | D.I. YOGYAKARTA    | OH     | 5.017.000  | 2.695.000                       | 1.384.000                                 | 845.000                                     |
| 16      | JAWA TIMUR         | OH     | 4.449.000  | 2.007.000                       | 1.153.000                                 | 814.000                                     |
| 17      | BALI               | OH     | 6.848.000  | 2.433.000                       | 1.685.000                                 | 1.138.000                                   |
| 18      | NUSA TENG. BARAT   | OH     | 3.500.000  | 2.648.000                       | 1.418.000                                 | 580.000                                     |
| 19.     | NUSA TENG. TIMUR   | OH     | 3.000.000  | 1.493.000                       | 1.355.000                                 | 550.000                                     |
| 20      | KALIMANTAN BARAT   | OH     | 2.654.000  | 1.538.000                       | 1.125.000                                 | 538.000                                     |
| 21      | KALIMANTAN TENGAH  | OH     | 4.901.000  | 3.391.000                       | 1.160.000                                 | 659.000                                     |
| 22      | KALIMANTAN SELATAN | OH     | 4.797.000  | 3.316.000                       | 1.500.000                                 | 540.000                                     |
| 23      | KALIMANTAN TIMUR   | OH     | 4.000.000  | 2.188.000                       | 1.507.000                                 | 804.000                                     |
| 24      | KALIMANTAN UTARA   | OH     | 4.000.000  | 2.188.000                       | 1.507.000                                 | 804.000                                     |
| 25      | SULAWESI UTARA     | OH     | 4.919.000  | 2.290.000                       | 924.000                                   | 782.000                                     |
| 26      | GORONTALO          | OH     | 4.168.000  | 3.107.000                       | 1.606.000                                 | 955.000                                     |
| 27      | SULAWESI BARAT     | OH     | 4.076.000  | 2.581.000                       | 1.075.000                                 | 704.000                                     |
| 28      | SULAWESI SELATAN   | OH     | 4.820.000  | 1.550.000                       | 1.020.000                                 | 732.000                                     |
| 29      | SULAWESI TENGAH    | OH     | 2.309.000  | 2.027.000                       | 1.567.000                                 | 951.000                                     |
| 30      | SULAWESI TENGGARA  | OH     | 2.475.000  | 2.059.000                       | 1.297.000                                 | 786.000                                     |
| 31      | MALUKU             | OH     | 3.467.000  | 3.240.000                       | 1.048.000                                 | 667.000                                     |
| 32      | MALUKU UTARA       | OH     | 3.440.000  | 3.175.000                       | 1.073.000                                 | 600.000                                     |
| 33      | PAPUA              | OH     | 3.859.000  | 3.318.000                       | 2.521.000                                 | 829.000                                     |
| 34      | PAPUA BARAT        | OH     | 3.872.000  | 3.212.000                       | 2.056.000                                 | 718.000                                     |
| 35      | PAPUA BARAT DAYA   | OH     |  |                                 |   |   |
| 36      | PAPUA TENGAH       | OH     |  |                                 |   |   |

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

11

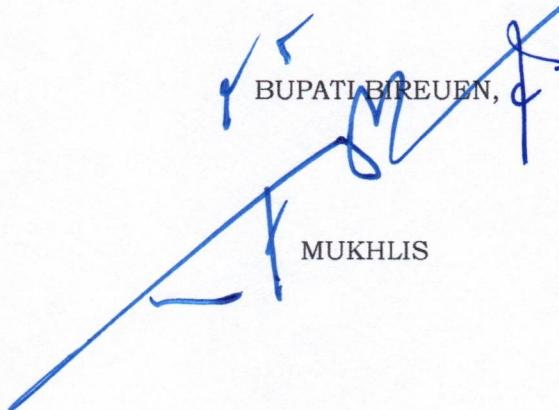
TABELok – 2.7  
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO. | UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS | SATUAN | LUAR DAERAH |
|-----|------------------------------------|--------|-------------|
| (1) | (2)                                | (3)    | (4)         |
| 1.  | PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH      | OH     | 250.000     |
| 2.  | PEJABAT ESELON I                   | OH     | 200.000     |
| 3.  | PEJABAT ESELON II                  | OH     | 150.000     |

BUPATI BIREUEN,  
MUKHLIS

**TABEL -2.8**  
**BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR**

| No  | Uraian  | Spesifikasi      | Satuan      | Harga Satuan |
|-----|---|------------------|-------------|--------------|
| 1.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh | <i>Halfday</i>   | Orang/Paket | 485.000      |
| 2.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh | <i>Fullday</i>   | Orang/Paket | 663.000      |
| 3.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh | <i>Fullboard</i> | Orang/Paket | 1.871.000    |
| 4.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau eselon I Provinsi Aceh | <i>Residence</i> | Orang/Paket | 1.116.000    |
| 5.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh                   | <i>Halfday</i>   | Orang/Paket | 413.000      |
| 6.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh                   | <i>Fullday</i>   | Orang/Paket | 575.000      |
| 7.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh                   | <i>Fullboard</i> | Orang/Paket | 1.151.000    |
| 8.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat eselon II Provinsi Aceh                   | <i>Residence</i> | Orang/Paket | 988.000      |
|     | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta  | <i>Halfday</i>   | Orang/Paket | 338.000      |
| 9.  | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta  | <i>Fullday</i>   | Orang/Paket | 425.000      |
| 10. | Biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor bagi peserta  | <i>Fullboard</i> | Orang/Paket | 992.500      |



BUPATI BIREUEN,  
MUKHLIS

**TABEL -2.9**  
**BIAYA SEWA KENDARAAN, TEMPAT, RUANGAN, PERALATAN DAN MESIN**

| No | Uraian   | Spesifikasi                                | Satuan    | Besaran    |
|----|--|--|-----------|------------|
| 1. | Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                    | Minibus Roda 4                             | Hari      | 900.000    |
|    |  | Kendaraan Roda 6/Bus Sedang                | Hari      | 3.400.000  |
|    |  | Kendaraan Roda 6/Bus Besar                 | Hari      | 4.800.000  |
| 2. | Sewa Kendaraan Operasional Pejabat                   | Kepala Daerah dan Ketua DPRK (luar daerah) | Hari      | 1.000.000  |
| 3. | Sewa Kendaraaan Operasional kantor dan/atau Lapangan | Kendaraan Angkut/Truk Enkel                | Hari      | 1.200.000  |
|    |  | Kendaraan Angkut/Truk Intercooler          | Hari      | 1.600.000  |
|    |  | Kendaraan Pick Up                          | Bulan     | 6.500.000  |
|    |  | Kendaraan Double Gardan                    | Bulan     | 16.000.000 |
|    |  |  |           |            |
| 4. | Sewa tempat/ruangan                                  | Aula Kapasitas Kecil                       |           | 2.000.000  |
|    |  | Aula Kapasitas Besar                       |           | 3.000.000  |
|    |  | Aula Kapasitas Sedang                      |           |            |
|    |  | Ruangan pertemuan di Hotel                 |           | 7.000.000  |
| 5. | Sewa alat kantor lainnya                             | Sewa sarung Kursi                          | Lembar    | 5.000      |
|    |  | Sewa Kursi                                 | Unit/Hari | 10.000     |
|    |  | Sewa Meja Prasmanan                        | Buah      | 600.000    |
|    |  | Sewa Kipas Angin                           | Buah      | 700.000    |
|    |  | Sewa Sound System                          | Hari      | 1.500.000  |
|    |  | Sewa Teratak                               | Unit      | 700.000    |
| 6. | Tagihan Air  | Langganan air bersih                       | M3        | 3.500      |
| 7. | Beban Jasa Jalan/Tol                                 | Tarif Jalan Tol                            | At Cost   | At Cost    |
|    |  |  |           |            |

Catatan :

- Sewa tidak bersifat terus menerus
- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan tidak termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan diperuntukkan bagi satuan kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Tarif jalan tol di bayar berdasarkan tarif yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil print

TABEL 3.0  
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

| No | Uraian                    | Satu<br>an | Jumlah |
|----|---------------------------|------------|--------|
| 1. | Penambah Daya Tahan Tubuh | OH         | 19.000 |
|    |                           |            |        |

BUPATI BIREUEN,  
MUKHLIS

**LAMPIRAN III:**  
**PERATURAN BUPATI BIREUEN**  
**NOMOR TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

**TABEL 1**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**

| No | Uraian<br>2                        | Satuan<br>3           | Jumlah<br>4 | Keterangan<br>5 |
|----|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1  | PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN  |                       |             |                 |
|    | a. Gedung Bertingkat               | m <sup>2</sup> /tahun | 192.000     |                 |
|    | b. Gedung Tidak Bertingkat         | m <sup>2</sup> /tahun | 148.000     |                 |
|    | c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor  | m <sup>2</sup> /tahun | 10.000      |                 |
| 2  | PEMELIHARAAN KENDARAAN PEJABAT     |                       |             |                 |
|    | a. Bupati/Ketua DPRK               | Unit/tahun            | 41.900.000  |                 |
|    | b. Anggota DPRK                    | Unit/tahun            | 41.000.000  |                 |
|    | c. Pejabat Eselon II.a             | Unit/tahun            | 39.000.000  |                 |
|    | d. Pejabat Eselon II.b             | Unit/tahun            | 37.500.000  |                 |
| 3  | PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL |                       |             |                 |
|    | a. Kendaraan Roda 4                | Unit/tahun            | 34.500.000  |                 |
|    | b. Kendaraan Roda 6                | Unit/tahun            | 37.100.000  |                 |
|    | c. Kendaraan Double Gardan         | Unit/tahun            | 35.600.000  |                 |
|    | d. Kendaraan Roda 2                | Unit/tahun            | 2.000.000   |                 |
| 4  | PEMELIHARAAN SARANA KERJA/KANTOR   |                       |             |                 |
|    | a. Inventaris Kantor               | Pegawai/tahun         | 80.000      |                 |
|    | b. Personal Komputer/Notebook      | Unit/tahun            | 730.000     |                 |
|    | c. Printer                         | Unit/tahun            | 690.000     |                 |
|    | d. AC Split                        | Unit/tahun            | 610.000     |                 |
|    | e. Genset lebih kecil dari 50 KVA  | Unit/tahun            | 7.190.000   |                 |
|    | f. Genset 75 KVA                   | Unit/tahun            | 8.640.000   |                 |
|    | g. Genset 100 KVA                  | Unit/tahun            | 10.150.000  |                 |
|    | h. Genset 125 KVA                  | Unit/tahun            | 10.780.000  |                 |
|    | i. Genset 150 KVA                  | Unit/tahun            | 13.260.000  |                 |
|    | j. Genset 175 KVA                  | Unit/tahun            | 14.810.000  |                 |
|    | k. Genset 200 KVA                  | Unit/tahun            | 15.850.000  |                 |
|    | l. Genset 250 KVA                  | Unit/tahun            | 16.790.000  |                 |
|    | m. Genset 275 KVA                  | Unit/tahun            | 17.760.000  |                 |
|    | n. Genset 300 KVA                  | Unit/tahun            | 20.960.000  |                 |
|    | o. Genset lebih besar dari 300 KVA | Unit/tahun            | 22.960.000  |                 |
|    | p. Genset 450 KVA                  | Unit/tahun            | 25.620.000  |                 |
|    | q. Genset 500 KVA                  | Unit/tahun            | 31.770.000  |                 |

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

11